



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGAWASAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
TERHADAP PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN DI KOTA BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

AYU RAHMAWATY

11527202967

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU

2020



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENGAWASAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERHADAP PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DI KOTA BENGKALIS”, yang ditulis oleh:

Nama : AYU RAHMAWATY
NIM : 11527202967
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji I
Ilham Akbar, SHI., SH., MH

Penguji II
Dr. H. Abu Samah, MH

(Handwritten signatures of the examiners)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

(NIP. 19580712 198603 1 005)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini berjudul *"Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Bengkalis"*.

Nama : AYU RAHMAWATY

Nim : 11527202967

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2020

Pembimbing Skripsi

SYAFRINALDI, SH, MA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

SYAFRINALDI, SH, MA

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Januari 2020

No Nota Dinas

Lamp

Hal Pengajuan Skripsi

Sdri. Ayu Rahmawaty

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara AYU RAHMAWATY, yang berjudul **"PENGAWASAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERHADAP PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DI KOTA BENGKALIS"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam siding munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

SYAFRINALDI, SH, MA

NIP.19810923 200604 1 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sat Islamic University of Sultan Syarif Kasim



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : AYU RAHMAWATY

NIM : 11527202967

Tempat/ Tanggal Lahir : BENGKALIS, 17 APRIL 1997

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGAWASAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERHADAP PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DI KOTA BENGKALIS” adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Maret 2020

Yang membuat pernyataan

AYU RAHMAWATY

NIM. 11527202967

Hak cipta dilindungi undang-undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak seluruh atau sebagian isi karya ilmiah ini tanpa izin dari penulis.
a. Pengutipan harus mengutip dengan benar dan mencantumkan sumber.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ayu Rahmawaty, (2020): Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Bengkalis

Pengawasan dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis terhadap aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sangat perlu ditingkatkan, mengingat Kota Bengkalis yang merupakan sebuah pulau yang menjadi pintu gerbang perekonomian internasional yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Pelabuhan merupakan salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam mendistribusikan barang-barang yang akan diperdagangkan baik didalam negeri maupun diluar negeri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan terhadap pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, serta kendala apa yang dialami Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam mengawasi pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dilihat dari jenis penelitian merupakan penelitian hukum sosiologis dimana penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif. Adapun penulis melakukan penelitian ini pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis dengan populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang, yaitu 3 orang pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan 6 orang dari buruh bongkar muat barang ilegal, kemudian mengambil sebanyak 9 orang sebagai sampel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan harapan dan peraturan yang mengatur, sedangkan kendala yang dialami Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam mengawasi pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan kurangnya koordinasi dalam menjalankan tugasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGAWASAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERHADAP PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DI KOTA BENGKALIS”. Shalawat dan salam tak lupa juga penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah berjasa dan berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahnda Amran dan ibunda Ernawati, yang merupakan orangtua dari penulis yang telah banyak berjasa mendidik dan membesarkan penulis dari kandungan hingga sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku rektor Uin Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suka Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Firdaus, SH. MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum beserta staff jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Syafrinaldi, SH.MA selaku dosen pembimbing dan juga penasehat akademis penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulis menyelesaikan skripsi dan selama masa perkuliahan penulis.
6. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Bapak Julharia, SE selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memperoleh informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada saudara kandung saya yang saya cintai, kak Dewi Sartika, bang Taufik Hidayat, kak Dewi Ardhiyanti dan adik Annisa Aulia. Terimakasih untuk semua bantuan dan dukungan kalian. Semoga Allah akan membalas semua kebaikan dan jasa kalian, aamiin.
9. Yomiardi Haciki, S.Ip yang selalu membantu dan memberikan support dari pertama hingga penulis menyelesaikan kuliah. Semoga sukses, selalu dipermudah dalam setiap urusannya dan kebaikannya semoga dibalas oleh Allah, aamiin.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum C 2015 yang penulis banggakan, khususnya Firdaus, Ayu Sartika Lestari dan Iim Juni Kaswanita, terimakasih telah menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan, semoga kalian sukses selalu.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Pakning Asal 2018 yang penulis sayangi, khususnya Siti Mamarthohiroh, S.Pd, Surtini, S.Pd, Prayetno SE, MM, Harry Yulian Andrami S.Ikom, Agus Salim S.T dan Lili Setiawati, S.Pt. Terimakasih untuk semua bantuan dan dukungan kalian. Semoga kita semua bertemu kembali dalam keadaan sukses semuanya.
12. Teman-teman Asyifa Qalbi yang penulis sayangi, Dina Lestari, S.P, Laila Manja S.P, Yuyun Yunengsih S.P, Nova Utafa Mofida S.P, Gusriani S.P, Delvi Utami, S.P, Dharma Juwita S.Pd, Ida Nurjannah, S.Pd. Semoga kita semua dapat berjumpa lagi dan dapat meraih kesuksesan didunia dan akhirat nanti aamiin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada semua pihak yang telah banyak berkontribusi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Januari 2020

Penulis

AYU RAHMAWATY

NIM. 11527202967

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis	
1. Letak Geografis Kabupaten Bengkalis	20
2. Ekonomi dan Pendidikan	21
3. Pemerintahan	22
B. Gambaran Umum Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan	
1. Sejarah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis	23
2. Visi dan Misi	26
3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi	27
4. Struktur Organisasi	31
5. Tugas Maing-Masing Bagian	32
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengawasan	
1. Pengertian Pengawasan	36
2. Tujuan Pengawasan	37
3. Fungsi Pengawasan	37
4. Norma Umum Pengawasan	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pelabuhan

1. Pengertian Pelabuhan	39
2. Macam Pelabuhan	40
3. Peranan Pelabuhan Laut.....	44
4. Fasilitas Pelabuhan	45
5. Dasar Hukum Kepelabuhanan	46

C. Penyelundupan

1. Pengertian Penyelundupan	46
2. Faktor Terjadinya Penyelundupan Barang	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kabupaten Bengkalis	49
B. Kendala yang Dialami Pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kabupaten Bengkalis	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	16
Tabel I.2 Kecamatan di Kabupaten Bengkalis 2017	21
Tabel IV.1 Daftar Nama Pelabuhan di Kabupaten Bengkalis.....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari banyak pulau, dimana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan satu-satunya yang dua pertiga atau 63% wilayah teritorialnya berupa perairan. Indonesia juga memiliki pantai yang terpanjang didunia, yaitu 81.000 Km. Sebagai bangsa kepulauan terbesar, Indonesia membutuhkan sektor maritim yang luas dan dikembangkan dengan baik sehingga dapat membantu negara untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. Pengembangan dari sektor maritim dapat menyumbangkan diantaranya:¹

1. Integrasi ekonomi dari kepulauan, dengan pergerakan komoditas yang diperdagangkan dan tenaga kerja yang bebas hambatan antara pulau-pulau.
2. Persaingan yang berhasil dengan bangsa-bangsa lain untuk memasok berbagai komoditas yang sudah atau belum diproses ke pasar dunia untuk komoditas tersebut.
3. Meminimalkan ongkos untuk mendapatkan impor untuk tambahan pasokan domestik, sehingga meningkatkan taraf hidup nasional.

¹ Elfrida Gultom, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h.1-3.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Integrasi sosial dan politik dari bangsa dengan pergerakan warga negara yang bebas hambatan diantara pulau-pulau untuk berbagai tujuan.
5. Peningkatan sektor jasa, dengan perolehan pendapatan valuta asing dalam industri-industri jasa seperti pelayaran, jasa perbaikan kapal, dan kepariwisataan.
6. Swasembada sektor maritim yang menghindari pengurusan pendapatan pemerintah yang umum, yang lebih dapat digunakan untuk mencapai layanan sosial universal, seperti pendidikan dan kesehatan.

Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau menganut konsep wawasan nusantara yang mempunyai tujuan bahwa wilayah nusantara beserta udara diatasnya dan laut yang menghubungkan pulau-pulau dengan segenap isinya merupakan kesatuan yang utuh dan terpadu serta menyeluruh.

Negeri ini memiliki hasil bumi, hasil laut dan hasil tambang yang sangat potensial. Kekayaan daratan dan perairan yang dapat digali atau dihasilkan dikirim kedaerah lain atau di ekspor. Sebagai negara kepulauan yang memiliki kawasan darat, laut dan udara, Indonesia memanfaatkan kawasan tersebut dengan menyediakan tiga jenis pengangkutan sebagai transportasi pengangkutan, yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut atau perairan dan pengangkutan udara untuk mengangkut hasil-hasil tersebut.

Untuk melayani kegiatan diatas, dibutuhkan sarana transportasi yang efektif dan efisien dalam arti aman, murah lancar, cepat, mudah, teratur dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

nyaman. Oleh karena itu, pembangunan sektor perhubungan mendapat perhatian besar dari pemerintah sehingga peningkatan frekuensi, regularitas atau kuantitas dan kualitas sarana secara khusus dapat bermanfaat untuk pengembangan perhubungan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.²

Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.258 pulau dengan dua pertiga bagian berupa lautan, hendaknya perlu mendapat respons yang baik. Dalam pembangunan prasarana transportasi terutama transportasi laut, selain sebagai sarana penghubung antara satu pulau dengan pulau lain, juga merupakan pendorong bagi bergerakaknya aktivitas sosial dan ekonomi disuatu kawasan berupa ekspor dan impor barang serta kegiatan lainnya, kawasan tersebut yaitu pelabuhan.³ Adapun yang dimaksud dengan pelabuhan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut adalah *“Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi”*.⁴

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara teknis, pelabuhan adalah salah satu bagian dari ilmu bangunan maritim, dimana padanya dimungkinkan kapal-kapal berlabuh atau bersandar kemudian dilakukan bongkar muat. Ditinjau dari sub sistem angkutan, maka pelabuhan adalah salah satu simpul dari mata rantai bagi kelancaran angkutan muatan laut dan darat. Jadi secara umum, pelabuhan adalah suatu daerah perairan yang terlindung terhadap badai/ombak/arus, sehingga kapal dapat bersandar sehingga aktifitas bongkar muat atas barang dan perpindahan penumpang dapat dilaksanakan.⁵

Pelabuhan merupakan kompleks yang luas yang terdiri dari bagian di air dan bagian di darat. Bagian di air dari pelabuhan diantaranya adalah kolam pelabuhan, fasilitas navigasi, kolam putar kapal, dok (galangan kapal atau bengkel kapal), dan lain-lain. Sementara itu, bagian didarat adalah gedung terminal penumpang, gudang penyimpanan barang, lapangan parkir, gedung kantor otoritas pelabuhan (pengelola pelabuhan) seperti kantor PT. PELINDO, Kesyahbandaran, administrator pelabuhan, bea cukai, karantina pelabuhan, dan kantor-kantor perusahaan pelayaran baik pemerintah atau swasta semacam PT. PELNI, Samudra Indonesia dan lain-lain. Kemudian ada lagi sirkulasi jalan raya didalam kawasan pelabuhan yang dilengkapi juga dengan terminal jalan raya (terminal bus atau mikrolet), pertokoan, restoran, kantor telkom, wartel, kantor pos dan sebagainya.⁶

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan

⁵ Soedjono Kramadibrata, *Perencanaan Pelabuhan*, (Bandung: Ganeca Exact Bandung, 1985), h. 64.

⁶ Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, (jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya nya secara bertanggungjawab. Melalui rencana pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah, pertama tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negri maupun luar negri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya, kedua kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda, misalkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya sedangkan di sektor lain mengalami penurunan. Inilah yang menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat mengenai arah dan makna pembangunan daerah.⁷

Suatu pelabuhan yang dikelola dengan efisien serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi perdagangan dan perindustrian dari tempat pelabuhan tersebut berada. Sebaliknya adanya perdagangan yang lancar dan perindustrian yang tumbuh dan berkembang, membutuhkan jasa pelabuhan yang semakin meningkat yang mengakibatkan perkembangan pelabuhan.⁸

⁷ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 81-82.

⁸ Abbas Salim, *Manajemen Pelayaran Niaga Dan Pelabuhan*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), h.51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perekonomian terbuka, peranan pelabuhan laut adalah antar negara dan pembangunan secara luas. Jadi, keterkaitan antara pelabuhan laut dan pembangunan adalah sangat jelas dan menarik baik ditinjau dari segi teori maupun praktek. Dinegara maju, perhatian banyak ditujukan kepada inovasi transportasi, sedangkan dinegara-negara berkembang lebih menekankan kepada penunjangannya terhadap pembangunan ekonomi yang cenderung makin luas dan makin pesat. Hasil-hasil studi menyatakan bahwa transportasi itu merupakan kekuatan pembentuk pertumbuhan ekonomi ataupun perkembangan daerah (wilayah). Seringkali dikatakan pula bahwa transportasi lebih merupakan suatu akibat daripada suatu sebab. Pernyataan yang sederhana tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat kuat antara transportasi dan pembangunan (demikian pula antara pelabuhan dan pembangunan).

Peranan pelabuhan laut dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang telah mendapat perhatian dalam beberapa dekade yang lalu. Tersedianya fasilitas pelabuhan yang cukup akan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan dukungan tersedianya pelayanan pelabuhan (laut) yang cukup dan efektif merupakan suatu kemutlakan.⁹

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang strategis letaknya, dimana berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia, Thailand dan Singapura) khususnya wilayah pesisir yang dinilai rentan disusupi oleh peredaran barang ilegal. Salah satu sarana yang menyebabkan dapat masuknya barang ilegal

⁹ Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 139-140.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut adalah pelabuhan-pelabuhan, dimana aktivitas dipelabuhan tersebut kurang mendapat pengawasan dari pihak berwenang. Padahal sudah dijelaskan dalam aturan hukum sebagaimana ditetapkan dalam bunyi Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan:

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.¹⁰

Pelabuhan sering dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk memasukkan barang-barang ilegal dengan cara tertentu guna mendapatkan keuntungan yang besar. Entah itu untuk menghindari pembayaran pajak, menghindari proses administrasi yang panjang atau barang yang diselundupkan adalah barang-barang terlarang. Terlebih selama ini, banyak diketahui di berbagai wilayah provinsi Riau khususnya di beberapa titik lokasi di Kota Bengkalis didapati adanya aktivitas yang bertentangan dengan aturan hukum di wilayah pelabuhan. Sejauh ini di Kota Bengkalis didapati beberapa pelabuhan yang kerap dijadikan sarana sebagai aktivitas keluar masuknya peredaran barang ilegal, baik itu seperti rokok, bahan makanan maupun barang terlarang seperti narkoba. Hal itu tentu saja membuat banyak kerugian dalam bidang perekonomian dan sosial di Kota Bengkalis itu sendiri.

¹⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaran pelabuhan di beberapa lokasi di Kota Bengkalis, telah lama menjadi pintu gerbang keluar masuknya barang-barang ilegal. Pelabuhan ini ada yang terletak di pusat kota maupun tempat-tempat yang berada di tepian pulau-pulau berpenghuni. Aktivitas ini disinyalir telah berlangsung selama puluhan tahun dan negara pun ikut serta dirugikan. Berbagai komoditi ilegal umumnya menyambangi Riau dengan masuk melalui pelabuhan yang kurang mendapatkan pengawasan.¹¹

Untuk mengantisipasi aktivitas keluar masuknya barang-barang ilegal di wilayah pelabuhan, maka diperlukan adanya peranan dari pemerintah untuk mengeliminasi adanya aktivitas tersebut, dimana salah satunya yaitu pengawasan dari pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 pasal 2 dan 3 huruf (c) yaitu:

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

¹¹ Mukhlison Widodo, *Pelabuhan Tikus Di Riau Perlu Disikapi Secara Kolektif*, <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/374581-Pelabuhan-Tikus-Di-Riau-Perlu-Disikapi-Secara-Kolektif>, 22 Desember 2018 pukul 14.22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.¹²

Menurut Winardi (2012) pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manager dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan menurut Basu Swasta (2012). Sedangkan menurut Komaruddin, pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.¹³

Keputusan Menteri Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, KM No. 14 Tahun 2002 Pasal 1, bongkar muat yaitu kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga dilambung kapal ke gudang lapangan

¹² Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

¹³ Galih Satriyo, *Pengaruh Pengawasan dan Keselamatan Kerja Terhadap Kegiatan Bongkar Muat Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi*, Volume. 2 Nomor. 1, 2017, h.2.



penumpukan atau sebaliknya (*stevedoring*), kegiatan pemindahan barang-barang dari dermaga di lambung kapal ke gudang lapangan penumpukan atau sebaliknya (*cargodoring*) dan kegiatan pengembalian barang dari gudang atau lapangan dibawa ke atas truk atau sebaliknya (*receiving/delivery*).¹⁴

Dalam pelaksanaannya di lapangan, Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan mewakili kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Pelabuhan yang merupakan daerah transit bagi masyarakat, selain sebagai tempat turun naik nya penumpang juga sebagai tempat kegiatan bongkar muat barang, kemudian ditambah dengan banyaknya kapal-kapal yang masuk dan keluar khususnya dalam kegiatan bongkar muat barang baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tentu saja memerlukan pengawasan yang baik dan maksimal serta proses administrasi yang tertib agar tidak terjadi tindakan penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Secara definitif, yang dimaksud dengan syahbandar adalah pejabat pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya peraturan-peraturan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban, dan lalu lintas kapal di pelabuhan. Seperti yang telah diketahui, wilayah pelabuhan terdiri dari wilayah laut dan wilayah daratan. Pengaturan, pengelolaan, serta pengoperasian wilayah laut di wilayah pelabuhan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kantor syahbandar yang tentu saja harus berkoordinasi

¹⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan instansi-instansi terkait lainnya, seperti kantor imigrasi, *port health center*/ rumah sakit pelabuhan dan lainnya. Di wilayah daratan, berdiri berbagai kantor instansi pemerintah, terkait dengan kegiatan operasional pelabuhan, antara lain kantor bea cukai, kantor administrator pelabuhan, rumah sakit pelabuhan, kantor syahbandar, kantor karantina tumbuhan/hewan, dan lain-lain. Juga terdapat kantor swasta/non pemerintah yang meliputi penyedia jasa antara lain perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat, perusahaan angkutan darat, perusahaan pergudangan, perusahaan ekspedisi dan lainnya. Ada juga perusahaan-perusahaan pengguna jasa yang antara lain meliputi pengusaha ekspor, pengusaha impor, dan pengusaha antar pulau.¹⁵

Kota Bengkalis yang merupakan sebuah pulau yang menjadi pintu gerbang perekonomian internasional karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand dinilai sangat rentan dengan adanya aktivitas penyelundupan barang-barang dari luar negeri dan dilakukannya bongkar muat barang ilegal tersebut pada pelabuhan yang pengawasannya dinilai kurang maksimal. Berdasarkan hasil observasi penulis, dalam kenyataannya di salah satu pelabuhan yang ada di Kota Bengkalis, yaitu pelabuhan Pelindo dimana pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan khusus untuk bongkar muat barang yang masuk maupun keluar, masih ditemukan adanya aktivitas bongkar muat barang-barang ilegal yang dilakukan oleh oknum yang melakukan kecurangan, karena dengan melakukan hal tersebut ia mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara melanggar aturan hukum. Hal ini tentunya membuat banyak

¹⁵ Herman Budi Sasono, *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*, (Yogyakarta: ANDI, 2012) h. 43.

kerugian di berbagai aspek seperti ekonomi, sosial dan budaya pada kota Bengkalis itu sendiri.

Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Di Kota Bengkalis”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang melingkupi penelitian ini, maka penulis membatasi masalah mengenai Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Aktivitas Bongkar Muat Barang Ilegal di salah satu pelabuhan yang ada di Kota Bengkalis yaitu Pelabuhan Pelindo Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Bengkalis.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Bengkalis?
2. Apa kendala yang dialami pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis dalam melakukan pengawasan terhadap pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Bengkalis ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang



Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Bengkalis.

b. Untuk mengetahui apa kendala yang dialami pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Bengkalis dalam melakukan pengawasan terhadap pelabuhan.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Untuk mendalami pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum pada konsentrasi hukum tata negara.

c. Untuk pedoman atau bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam mengenai masalah Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan terhadap Pelabuhan.

E. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik dan lengkap, maka perlu menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan cara melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data berupa wawancara untuk dijadikan data atau sebagai bahan informasi dalam penelitian hukum ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian.

2. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama. Sampel adalah himpunan dari populasi.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan berjumlah 3 orang, buruh bongkar muat barang ilegal 6 orang.

Adapun sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang, dimana untuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis berjumlah 3 orang dan buruh bongkar muat barang ilegal sebanyak 6 orang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan total sampel, yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling adalah karena jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya.¹⁷

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RAD*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 26.

TABEL 1.1

Populasi dan Sampel

NO	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kabupaten Bengkalis	3 Orang	3 Orang	100 %
2	Buruh Bongkar Muat Barang Ilegal	6 Orang	6 Orang	100%
Jumlah		9 Orang	9 Orang	100%

3. Objek dan Subjek Penelitian

- Objek penelitian ini adalah Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan terhadap pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- Subjek penelitian ini adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Bengkalis.

4. Sumber Data

- Sumber Data Primer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU



Yaitu sumber data yang diperoleh langsung berupa observasi dan wawancara dari tempat penelitian yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan riset kepustakaan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.

b. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis serta buruh bongkar muat barang ilegal.

c. Study pustaka

Yaitu penulis mengambil data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

6. Teknik analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dimana setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I :

PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II :

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum tentang Kabupaten Bengkalis, Gambaran Umum Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis yang terdiri dari sejarah kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Tugas dan Fungsi Pokok Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Visi Misi, Struktur Organisasi serta Tugas Masing-masing Bagian.

BAB III :

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan pengertian dan teori-teori yang mendasari masalah pokok penelitian ini, dalam konsep pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan terhadap pelabuhan di Kota Bengkalis.

BAB IV :

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan bagaimana Pengawasan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012, dan apa saja kendala yang dialami pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelabuhan di Kota Bengkalis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

1. Letak Geografis Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang terletak dibagian pesisir timur Pulau Sumatera. Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan daratan rendah, rata-rata ketinggian antara 2-6,1 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah 11.481.22 KM², yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat 33 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di Kabupaten Bengkalis. Sebagian besar merupakan tanah organosol yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik, terdapat di sungai, tasik serta pulau besar dan kecil. Batas-batas daerah di Kabupaten Bengkalis adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.¹⁸

Letak Kabupaten Bengkalis ini sangat strategis, karena disamping berada pada alur pelayaran internasional yang paling sibuk didunia, yakni Selat Malaka juga berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Negara Malaysia dan

¹⁸ <https://bengkaliskab.bps.go.id> (diakses pada 10 Oktober 2019, pukul 16.23 WIB).



Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi Negara Malaysia dan Thailand (IMS-GT). Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 (delapan) wilayah kecamatan, yaitu:

Tabel 1.2 Kecamatan di Kabupaten Bengkalis 2017

NO	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Daerah Kecamatan (KM)
1	Bengkalis	Bengkalis Kota	514.00
2	Bantan	Selat Baru	424.00
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1.128.00
4	Siak Kecil	Lubuk Muda	742.21
5	Mandau	Air Jamban	937.47
6	Rupat	Batu Panjang	896.35
7	Rupat Utara	Tanjung Medang	628.50
8	Pinggir	Pinggir	2.503.00

Sumber: Data BPS Kabupaten Bengkalis 2017

2. Ekonomi dan Pendidikan

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dikembangkan menjadi daerah dengan konsentrasi pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Perekeonomian daerah ini tumbuh karena perkembangannya dilakukan secara terpadu oleh pemerintah dan swasta. Dengan ekonomi yang dimiliki daerah ini, maka setiap keputusan atau kebijakan dalam menangkap peluang pengembangan dapat segera dihasilkan tanpa melalui proses birokrasi yang panjang.¹⁹ Kondisi

¹⁹ *Ibid.*



inilah yang diharapkan menjadi keunggulan Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi globalisasi dan persaingan. Penduduk Kabupaten Bengkalis sebagian besar bermata pencaharian nelayan dan bertani, hal ini dikarenakan kondisi alam yang mendukung terutama dalam sumber daya hasil laut yang cukup melimpah. Mata pencaharian yang lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), POLRI, Buruh atau jasa, pedagang dan lain-lain. Sementara itu pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan dalam gerak pembangunan dan serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan akan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masyarakat dalam bidang pendidikan. Ibu kota Bengkalis dapat dikatakan sebagai pusat pendidikan karena di daerah ini dapat dikatakan lengkap mulai dari taman kanak-kanak sampai pendidikan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dengan adanya fasilitas ini akan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berpotensi dalam meningkatkan ekonomi Kabupaten Bengkalis.²⁰

3. Pemerintahan

Dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu adanya instansi / lembaga pemerintahan dalam kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan pemerintah dan kemasyarakatan. Instansi pemerintah tersebut meliputi:

a. Instansi Otonom

Instansi yang ada status otonom dalam Pemerintahan Kabupaten Bengkalis antara lain: Rumah Sakit, Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan, Dinas

²⁰ *Ibid.*



Peternakan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, UPTD dan sebagainya.

b. Instansi Vertikal

Instansi yang ada dengan status vertikal yang berada dilingkungan Pemerintahan pada Kabupaten Bengkalis, antara lain: Administrasi Pelabuhan (ADPEL), Bea dan Cukai, Imigrasi, Pajak, BKKBN, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan.

c. Instansi BUMN/BUMD yang berada dikawasan Kabupaten Bengkalis, antara lain: PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia I (PELINDO), PT. PLN, Pos Indonesia, PT. BNI, BRI, dan sebagainya.²¹

B. Gambaran Umum Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis

1. Sejarah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis

Emanuel Gordinho de Eredia dalam bukunya *Declaracam de Malaca e India Meridional com o Cathay* yang diterbitkan pada tahun 1613 dapat memberikan gambaran tentang Bengkalis pada saat itu. Gordinho menggambarkan Bengkalis sebagai tempat berdagang lada hitam. Lada hitam yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari berbagai daerah di *barter* dengan berbagai komoditas khususnya kain di Bengkalis. Lada hitam ini kemudian dibawa ke belahan dunia yang lain oleh pedagang dari Arab, Cina, India, Portugis, dan lain-lainnya.

Untuk mengendalikan perdagangan di Bengkalis, Johor menempatkan seorang Syahbandar. Meski Melaka telah jatuh ke tangan Portugis, namun beberapa negeri yang berada dibawah naungan Melaka tetap meneruskan taat setia

²¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kepada Kesultanan Melayu Johor yang dianggap kelanjutan dari Kesultanan Melaka. Negeri-negeri ini termasuk Bengkalis diperintah oleh Sultan Johor dengan mengangkat penguasa-penguasa lokal yang taat setia kepada Johor. Syahbandar Bengkalis yang dilantik oleh Johor bertanggungjawab kepada Penghulu Bendahari. Hal ini sejalan dengan adat kebiasaan yang diterapkan dalam Kerajaan Melaka sebelumnya.

Jabatan Syahbandar diperkirakan bermula di Kerajaan Melaka ketika diperintah oleh Sultan Mansur Syah (1456-1477). Melihat perkembangan Melaka sebagai kota pelabuhan dan perdagangan diperlukan jabatan khusus yang mengelolanya. Untuk itu dibentuk suatu jabatan yang dipegang oleh orang kepercayaan Sultan Melaka yang menerajui permasalahan perdagangan dan berkuasa di pelabuhan. Walaupun sebagai jabatan yang baru, posisi Syahbandar dalam Undang-Undang Melaka setara dengan Empat Pembesar Utama Kerajaan Melaka (Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung, dan Laksamana). Namun selanjutnya dalam perjalanan sejarah, jabatan Syahbandar berada dibawah Penghulu Bendahari.

Susun lapis pemerintahan Kerajaan Melaka ini dilanjutkan oleh Kerajaan Johor. Jabatan Syahbandar diberikan kepada anggota Majelis Orang Kaya yang dianggap mampu dan mendapat kepercayaan dari sultan. Syahbandar Bengkalis yang diangkat oleh Johor bergelar Setia Raja.²²

Fakta ini menunjukkan bahwa walau Portugis menguasai Melaka namun kuasanya tidak sampai ke Bengkalis. Kegiatan perdagangan di Bengkalis sendiri

²²

Riza

Pahlefi,

Syahbandar

Bengkalis,

<https://www.google.com/amp/s/sejarahbengkalisblog.wordpress.com/2016/07/03/syahbandar-bengkalis/amp/>, (diakses pada 29 November 2019, pukul 17.45).



setiap tahunnya mencapai puncak pada bulan Mei dan November. Bengkalis saat itu didiami oleh orang laut. Gordinho melukiskan orang laut yang tinggal di Bengkalis memiliki sifat yang ganas dan sebagian besar berprofesi sebagai bajak laut yang ditakuti baik oleh kapal-kapal Portugis maupun kapal-kapal Belanda.

Setelah Melaka direbut dari Portugis, dengan difasilitasi oleh Belanda, Johor menandatangani perjanjian perdamaian dengan Aceh. Dengan perjanjian ini, Aceh mengembalikan kawasan Bengkalis, Rokan dan Siak kepada Johor sehingga Sultan Abdul Jalil dapat mengangkat syahbandar di Bengkalis. Tugas utama Syahbandar Bengkalis adalah memungut pajak dan cukai dari kapal-kapal yang berdagang di Bengkalis. Belanda berkepentingan terhadap perdamaian ini karena jika perang Johor dengan Aceh berterusan maka keamanan perairan Selat Melaka akan terganggu dan ini akan menjelaskan Melaka sebagai pelabuhan perdagangan yang baru direbut dari Portugis.

Persaingan VOC dengan Johor memperebutkan hegemoni perdagangan di rantau pesisir timur Sumatera berlangsung sengit. Ini memberikan hikmah tersendiri bagi Bengkalis sebagai salah satu pusat perdagangan Johor. Persaingan Melaka dengan Bengkalis yang berebut menjadi pusat perdagangan mencerminkan pertelagahan Belanda dengan VOC-nya dan Johor dengan Laksamananya.²³

Pada Mei 1673, Belanda mendapat kabar dari pedagang Melayu yang datang dari Bengkalis yang mengabarkan tentang pelanggaran Jambi atas Johor. Kekalahan Johor atas Jambi di Pasir Raja atau Batu Sawar (Johor Lama) pada

²³ *Ibid.*



April 1673 menyebabkan berkurangnya kemampuan tempur armada Johor dan kesempatan ini diambil oleh Jambi dengan memperluas serangannya ke kawasan-kawasan Johor lainnya, termasuk Bengkalis. Pada bulan November 1673, Syahbandar Bengkalis Orang Kaya Setia Raja, telah meminta kepada Belanda tiga pucuk senapang kecil, sepuluh pucuk senjata api yang lebih besar, peluru, dan peluru senapang karena Jambi mencoba hendak menyerang Bengkalis.

Sebagai pelabuhan yang memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Johor, jabatan Syahbandar Bengkalis selalu menjadi rebutan. Yang ditunjuk menjadi syahbandar adalah orang-orang kepercayaan penguasa Johor. Ketika Laksamana Tun Abdul Jamil menjadi orang dekat Sultan, maka yang menjadi syahbandar di Bengkalis adalah orang kepercayaannya. Demikian pula ketika Laksamana Tun Abdul Jamil disingkirkan maka segera syahbandar Bengkalis diganti oleh orang kepercayaan Bendahara Sri Maharaja Tun Habib Abdul Majid. Syahbandar Bengkalis adalah salah satu jabatan yang penting di Kerajaan Johor dan dijabat hanya oleh orang-orang tertentu. Gelar yang diberi adalah Setia Raja yang membawa panggilan Orang Kaya.²⁴

2. Visi dan Misi

Adapun visi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan berdasarkan visi Direktorat Jenderal Perhubungan adalah: Terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara.

²⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan misi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kabupaten Bengkalis berdasarkan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna.
- b. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara.
- c. Menyelenggarakan keselamatan dan keamanan angkutan perairan dan pelabuhan.
- d. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara.
- e. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan.²⁵

3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor

36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, yaitu:

- a. Kedudukan

²⁵ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, *Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut*, <http://hubla.dephub.go.id/profil/pages/Visi-Misi.aspx>, (diakses pada 3 Desember 2019, pukul 16.55).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut.
2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

b. Tugas

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.²⁶

c. Fungsi

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
2. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
3. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang

²⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

4. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran diperairan pelabuhan, penanganan musibah dilaut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
6. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri;
7. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahanan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta sarana bantu navigasi pelayaran;²⁷

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
9. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
10. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
11. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

d. Klasifikasi

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kelas, terdiri atas:

1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I;
2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II;
3. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III;
4. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV; dan
5. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V.²⁸

²⁸ *Ibid.*

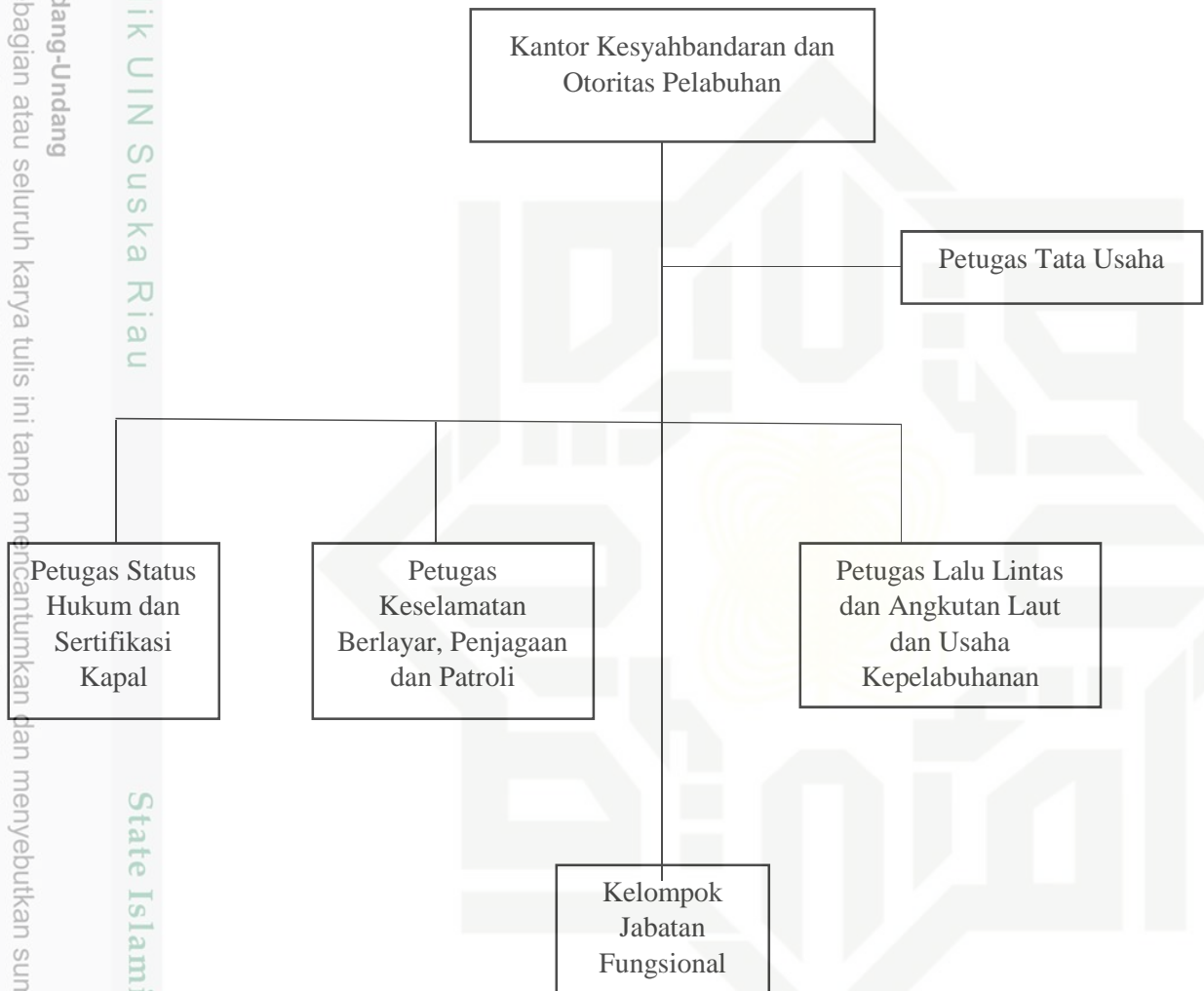
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Struktur Organisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Bengkalis



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis



Tugas Masing-masing Bagian

a. Petugas Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

b. Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan *docking* kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran.²⁹

Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli

Mempunyai tugas melaksanakan melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal di perairan

²⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port State control*), *flag State control* dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/ SAR*), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, *saluage* dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Secnrity Code / ISPS-Code*), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

1. Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja

³⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/ masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, fasilitas dan operasional pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa, penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam, penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan.³¹

³¹ *Ibid.*



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.³²

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.³³

³² Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 15.

³³ *Ibid.*



2. Tujuan Pengawasan

Menurut Ranupandojo, tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan Soekarno dalam Gouzali Saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
2. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
4. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan.
5. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan.³⁴

3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar, sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkannya.

Fungsi pengawasan tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi tentang perlunya disiplin, mematuhi segala peraturan demi keselamatan kerja bersama.

³⁴ *Ibid.*



Sosialisasi perlu dilakukan terus-menerus, karena usaha pencegahan sangat penting mendapatkan perhatian.³⁵

4. Norma Umum Pengawasan

Adapun norma umum dalam pengawasan terbagi atas 4 macam, diantaranya yaitu:

- a. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah, tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana terjadinya, serta menemukan cara bagaimana memperbaikinya.
- b. Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan terus-menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan.
- c. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi dan penyelewengan yang ditemukan, untuk mencegah berlanjutnya kesalahan dan/atau penyimpangan.
- d. Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan penyimpangan, disamping menjadi pendorong dan perangsang untuk menerbitkan dan menyempurnakan kondisi obyek pengawasan.³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sujamto, *Norma & Etika Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h.19.



B. Pelabuhan

1. Pengertian Pelabuhan

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Ayat (2), Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.³⁷

Pelabuhan juga menjadi terminal arus keluar masuknya truk-truk angkutan darat antarkota maupun antar provinsi. Semua arus yang melalui atau singgah disuatu pelabuhan laut tentu tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja, namun masing-masing arus tersebut akan ditangani/diatur oleh berbagai instansi pemerintah terkait atau lembaga swasta terkait. Arus kapal ke/dari luar negeri serta kapal-kapal antarpulau ditangani/diatur oleh kantor kesyahbandaran. Pada waktu kapal bermuatan barang impor dari berbagai negara akan memasuki pelabuhan, maka dibatas terluar perairan pelabuhan, kapal harus

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berlabuh/membuang jangkar terlebih dahulu, harus antri agar bisa menuju kolam pelabuhan melalui alur laut dengan dipandu oleh kapal pandu serta didampingi oleh kapal tunda. Setelah itu kapal harus berlabuh dikolam pelabuhan, antri agar bisa merapat dan bersandar ditepi dermaga yang ditentukan oleh pihak administrator pelabuhan guna melakukan kegiatan bongkar muat barang ekspor impor. Sebelum izin sandar diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran, pihak kapal harus bisa menunjukkan semua dokumen kapal/sertifikat kapal yang melindungi kapal tersebut dalam melewati wilayah laut atau memasuki pelabuhan wilayah itu.³⁸

Pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran (*crane*) untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya.³⁹

2. Macam Pelabuhan

Pelabuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam yang tergantung pada sudut tinjauannya, yaitu dari segi penyelenggaraannya, segi pengusahaannya, fungsi dalam perdagangan nasional dan internasional, segi kegunaan dan letak geografisnya.

³⁸ Herman Budi Sasono, *Op.Cit*, h.1.

³⁹ Bambang Triatmodjo, *Perencanaan Pelabuhan*, (Yogyakarta: Beta Offset, 2009) h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Ditinjau dari Segi Penyelenggaraannya:

1. Pelabuhan Umum

Pelabuhan umum diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan untuk maksud tersebut.

2. Pelabuhan Khusus

Pelabuhan khusus diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Pemerintah.

b. Ditinjau dari Segi Pengusahaannya:

1. Pelabuhan yang Diusahakan

Pelabuhan ini sengaja diusahakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, menaik turunkan penumpang serta kegiatan lainnya.⁴⁰

2. Pelabuhan yang Tidak Diusahakan

Pelabuhan ini hanya merupakan tempat singgahan kapal, tanpa fasilitas bongkar-muat, bea cukai dan sebagainya. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan kecil yang disubsidi oleh pemerintah dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Laut.⁴¹

c. Ditinjau dari Fungsi Perdagangan Nasional dan Internasional:

1. Pelabuhan Laut

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang bebas dimasuki oleh kapal-kapal berbendera asing. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan utama disuatu daerah yang dilabuhi kapal-kapal yang membawa barang untuk ekspor/impor secara langsung ke dan dari luar negeri.

2. Pelabuhan Pantai

Pelabuhan pantai ialah yang disediakan untuk perdagangan dalam negeri dan oleh karena itu tidak bebas disinggahi oleh kapal berbendera asing. Kapal asing dapat masuk ke pelabuhan ini dengan meminta izin terlebih dahulu.

d. Ditinjau dari Segi Penggunaannya:

1. Pelabuhan Ikan

Pelabuhan ikan menyediakan tempat bagi kapal-kapal ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan memberikan pelayanan yang diperlukan.

2. Pelabuhan Minyak

Untuk keamanan, pelabuhan minyak harus diletakkan agak jauh dari kepentingan umum. Pelabuhan minyak biasanya tidak memerlukan dermaga atau pengkalan yang harus dapat menahan muatan vertikal yang besar, melainkan cukup membuat jembatan perancah atau tambatan yang di buat menjorok ke laut.⁴²

3. Pelabuhan Barang

Di pelabuhan ini terjadi perpindahan moda transportasi, yaitu dari angkutan laut ke angkutan darat dan sebaliknya. Barang di bongkar dari kapal dan diturunkan di dermaga.

⁴² Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelabuhan Penumpang

Pelabuhan/ terminal penumpang digunakan oleh orang-orang yang berpergian dengan menggunakan kapal penumpang.

5. Pelabuhan Campuran

Pada umumnya pencampuran pemakaian ini terbatas untuk penumpang dan barang, sedang untuk keperluan minyak dan ikan biasanya tetap terpisah.

6. Pelabuhan Militer

Pelabuhan ini mempunyai daerah perairan yang cukup luas untuk memungkinkan gerakan cepat kapal-kapal perang dan agar letak bangunan cukup terpisah.

e. Ditinjau Menurut Letak Geografis:

1. Pelabuhan Alam

Pelabuhan alam merupakan daerah perairan yang terlindungi dari badai dan gelombang secara alami.

2. Pelabuhan Buatan

Pelabuhan buatan adalah suatu daerah perairan yang dilindungi dari pengaruh gelombang dengan membuat bangunan pemecah gelombang.

3. Pelabuhan Semi Alam

Pelabuhan ini merupakan campuran dari kedua tipe diatas. Misalnya suatu pelabuhan yang terlindung oleh lidah pasir dan perlindungan buatan hanya pada alur masuk.⁴³

⁴³ Ibid.



3. Peranan Pelabuhan Laut

Pelayanan jasa kepelabuhanan abad ke-21 ini, tidak lagi terbatas hanya pada peran tradisionalnya sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan bongkar muat kargo, melainkan telah berkembang menjadi titik sentral pembangkit tenaga penggerak pembangunan. Pada pendekatan *logistical approach*, pelabuhan berada dalam posisi luar biasa dan strategis. Beberapa alasan penting yang menempatkan pelabuhan berperan strategis dalam jaringan perdagangan internasional, diantaranya adalah:

- a. Pelabuhan berperan menjembatani *gap* diantara sumber-sumber daya produksi seperti tenaga kerja dan *raw/semi-finished material* dengan menggunakan transportasi laut dari tempat asal (*origin*) ketempat tujuan (*destination*). Misalnya, di lokasi dekat lingkungan pelabuhan didirikan pabrik perakitan alat-alat berat dan/atau kendaraan yang materialnya diimpor untuk kemudian di ekspor melalui pelabuhan, sehingga biaya pengangkutan maupun risiko kerusakan yang dikeluarkan menjadi rendah.
- b. Pelabuhan sebagai *interface* terpenting moda transpor darat (truk dan KA) dan moda angkutan laut, memberikan kontribusi sangat signifikan bagi pelaku usaha pengirim/pemilik barang, pemilik/keagenan kapal, *charter broker* kapal, industri manufaktur dan pengemasan, pengusaha angkutan truk/KA, jasa layanan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, *marine inspector*, industri/bengkel kapal, bank dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan asuransi. Dalam hal ini pelabuhan menjadi lingkungan tempat kegiatan berbagai macam bisnis.

- c. Pelabuhan sebagai titik kegiatan pemberangkatan dan kedatangan moda transportasi laut. Pengangkutan dengan memakai kapal laut dimulai dipelabuhan dan berakhir di pelabuhan. Sistem tradisional semacam ini, dulu dikenal dengan sistem angkutan *Port to Port*. Pada era *millenium* kini tidak hanya angkutan *Port to Port*, melainkan lebih luas menjadi layanan angkutan *Door to Door*.⁴⁴

4. Fasilitas Pelabuhan

Untuk menunjang kelancaran aktivitas di pelabuhan, dalam pelabuhan tersedia berbagai fasilitas. Kelengkapan fasilitas ini juga bisa menjadi ukuran baik buruknya suatu pelabuhan. Berikut adalah beberapa fasilitas utama dalam pelabuhan:

1. Penahan Gelombang
2. Jembatan
3. Dolphin (tonggak-tonggak besi)
4. Mooring Buoys (pelampung dimana kapal ditambatkan untuk melakukan suatu kegiatan)
5. Tempat Labuh
6. Single Buoy (pelampung pengikat dimana kapal tanker dapat bongkar muat muatannya melalui pipa di pelampung itu)
7. Tongkang (Lighter)

⁴⁴ Lasse, *Manajemen Bisnis Transportasi Laut, Carter dan Klaim*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 232-233.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan
9. Rambu Kapal
10. Gudang
11. Dermaga⁴⁵

5. Dasar Hukum Kepelabuhanan

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan

C. Penyelundupan

1. Pengertian Penyelundupan

Penyelundupan adalah kriminal bertujuan ekonomi dan harta kekayaan. Menghadapi penyelundupan tidak hanya melibatkan institusi kepolisian dan militer, melainkan harus dihadapi bersama-sama dengan institusi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina. Aksi penyelundupan dilakukan perorangan dalam jaringan terorganisasi dan/atau bekerja sama dengan awak kapal. Manipulasi melalui pemalsuan dokumen muatan kapal juga dapat dikategorikan sebagai penyelundupan.

⁴⁵ Suyono, *Shipping: Pengangkutan Intemodal Ekspor Impor Melalui Laut*, (Jakarta: PPM, 2005), h.13-17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dari barang muatan kapal, praktik penyelundupan dewasa ini terjadi meliputi antara lain:

- a. Senjata, dalam skala kecil dilakukan perorangan sedangkan dalam skala besar dilakukan broker persenjataan untuk keperluan persiapan perang dan pemberontakan, misalnya teroris.
- b. Penyelundupan manusia, untuk di perjualbelikan yang telah dikenal sejak zaman perbudakan yang telah dilarang secara universal.
- c. Obat-obatan terlarang, karena harga nya yang sangat mahal dan dilarang oleh hukum, orang tergiur melakukan perbuatan terlarang tersebut.⁴⁶

2. Faktor Terjadinya Penyelundupan Barang

Pada dasarnya memang faktor keuntungan besar dan mencari kesempatan menjadi alasan penyelundupan barang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Namun faktor lain juga bisa menjadi pendukung terjadinya kasus penyelundupan barang ini. Sehingga memang perlu diperhatikan tidak hanya pada pemerintah tetapi juga berbagai sektor lainnya yang terkait agar bisa saling merangkul untuk mengatasi masalah penyelundupan barang ini secara lebih optimal. Berikut adalah beberapa penyebab yang dapat meningkatkan penyelundupan yaitu:

- a. Adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara barang yang ada didalam dan diluar negeri. Tentunya hal ini erat kaitannya dengan keuntungan materi beberapa pihak, sehingga akhirnya mereka memutuskan

⁴⁶ Lasse, *Manajemen Muatan Aktivitas Rantai Pasok di Area Pelabuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 416-417.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyelundupkan barang tersebut agar dapat dijual di Indonesia dengan harga lebih murah tetapi dapat untung yang besar.

b. Adanya barang tersebut dilarang untuk di impor atau di ekspor dengan berbagai alasan yang sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pihak pemerintah. namun ternyata larangan tersebut justru membuat beberapa pihak tertarik untuk menyelundupkannya.

c. Penetapan tarif untuk impor dan ekspor barang yang semakin meningkat tentu menjadi alasan yang kuat bagi pihak yang ingin menyelundupkan barang. Dengan melakukan penyelundupan maka mereka tidak perlu mengeluarkan budget tambahan untuk membayar biaya bea cukai sesuai ketentuan yang telah dibuat sebelumnya.

d. Adanya permintaan pasar yang besar tetapi pasokan bahan baku tidak ada atau jumlahnya sedikit. Maka jika berpikir untuk keuntungan perusahaan maka akan menambah bahan baku secara impor meskipun dengan cara yang ilegal atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴⁷

⁴⁷

<https://www.kirimanku.id/Berita/Penyelundupan-Barang-yang-Semakin-Marak-di-Indonesia-.html> (Diakses pada 09 Desember 2019).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan terhadap pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Bengkalis adalah mengawasi setiap kegiatan bongkar muat barang maupun penumpang, tersedianya sarana dan prasarana dalam hal untuk melakukan kegiatan pengawasan, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal pengawasan terhadap pelabuhan, memberikan informasi, saran dan pengarahan tentang izin operasional terminal, melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelabuhan, mengawasi di pintu masuk dan keluar pelabuhan serta pengawasan terhadap pedagang kaki lima. Kurang maksimalnya pengawasan dari pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis menyebabkan masih didapati adanya aktivitas bongkar muat barang illegal sehingga pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Kendala yang dialami pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis dalam melakukan tugas pengawasan terhadap pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah; kurangnya sarana dan prasarana, Kurangnya personil untuk melakukan kegiatan pengawasan dan kurang maksimalnya koordinasi antar stakeholder di wilayah pelabuhan.

B. Saran

1. Pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan seharusnya lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan sehingga tidak ada lagi celah bagi oknum-oknum untuk melakukan penyelundupan barang dan melakukan aktivitas bongkar muat ilegal.
2. Bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan ekspor dan impor barang sebaiknya mengurus perizinan kegiatan bongkar muat barang terlebih dahulu sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku sebelum mengoperasikannya, karena banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari aktivitas bongkar muat barang ilegal ini bagi negara khususnya bagi daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita Sakti, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Gultom Elfrida, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Kuncoro Mudrajad, *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014)
- Kramadibrata Soedjono, *Perencanaan Pelabuhan*, (Bandung: Ganeca Exact Bandung, 1985)
- Lasse, *Manajemen Bisnis Transportasi Laut, Carter dan Klaim*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)
- Lasse, *Manajemen Muatan Aktivitas Rantai Pasok di Area Pelabuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Miro Fidel, *Pengantar Sistem Transportasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012)
- Salim Abbas, *Manajemen Pelayaran Niaga Dan Pelabuhan*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995)
- Sasono Budi Herman, *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*, (Yogyakarta: Andi, 2012)
- Suadi Amran, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Sujanto, *Norma & Etika Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Suyono, *Shipping: Pengangkutan Intemodal Ekspor Impor Melalui Laut*, (Jakarta: PPM, 2005)

Triatmodjo Bambang, *Perencanaan Pelabuhan*, (Yogyakarta: Beta Offset, 2009)

Undang-undang:

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011
Tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2017
Tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa
Kepelabuhanan

Jurnal:

Gultom Elfrida, 2017, *Pelabuhan Indonesia Sebagai Penyumbang Devisa Negara
Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnnal Ilmu Hukum, Volume. 19 Nomor.
3

Satriyo Galih, 2017, *Pengaruh Pengawasan dan Keselamatan Kerja Terhadap
Kegiatan Bongkar Muat Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi, Jurnal Discovery Volume. 2 Nomor.

1

Ensiklopedia:

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, *Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut*, <http://hubla.dephub.go.id/profil/pages/Visi-Misi.aspx>

Hanna Uciha, “*Kenapa Penyelundupan Terus Terjadi?*”, <https://hanauchiha.wordpress.com/2008/09/15/kenapa-penyelundupan-terus-terjadi/>

<https://bengkaliskab.bps.go.id>

<https://www.riau.go.id/home/content/6/kab-bengkalis>

<https://www.kirimanku.id/Berita/Penyelundupan-Barang-yang-Semakin-Marak-di-Indonesia-.html>

Mukhlison Widodo, *Pelabuhan Tikus Di Riau Perlu Disikapi Secara Kolektif*, <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/374581-Pelabuhan-Tikus-Di-Riau-Perlu-Disikapi-Secara-Kolektif>

Riza Pahlefi, Syahbandar Bengkalis, <https://www.google.com/amp/s/sejarahbengkalisblog.wordpress.com/2016/07/03/syahbandar-bengkalis/amp>



DAFTAR WAWANCARA

1. Berapa jumlah pelabuhan yang ada di Kabupaten Bengkalis ?
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pengawasan terhadap pelabuhan di kota Bengkalis ?
3. Apa kendala yang dialami dalam melakukan pengawasan terhadap pelabuhan yang ada di Kota Bengkalis ?
4. Apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya bongkar muat barang ilegal di pelabuhan yang ada di Kota Bengkalis ?
5. Mengapa pelabuhan di Kota Bengkalis menjadi sasaran sebagai sarana dalam penyelundupan barang ilegal ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/27673
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

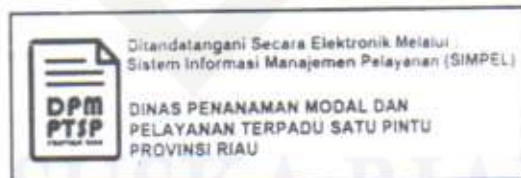
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/Fa.PP.00.9/9071/2019** Tanggal **11 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **AYU RAHMAWATY**
2. NIM KTP : **11527202967**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PENGAWASAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERHADAP PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DI KOTA BENGKALIS**
7. Lokasi Penelitian : **KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KABUPATEN BENGKALIS**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 November 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751

Telepon. 0766 - 23615, 0766 - 7018510 Fax. 0766 - 23615 E-mail : Website : www.bengkalis.go.id

Bengkalis, 18 November 2019

Kepada :

Yth. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Kabupaten Bengkalis
di-
Bengkalis

Nomor : 061/DPMPSP-JU/XI/2019/611
Lampiran :
Hal : Rekomendasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/27673 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **AYU RAHMAWATY**
NIM : 11527202967
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : UIN Suska Riau
Jenjang : S1
Alamat : Jl. HR. Soebrantas Pekanbaru

Bermaksud mengadakan riset / pra riset dalam rangka penulisan skripsi :

1. Judul :

"Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Bengkalis".

2. Lokasi Penelitian :

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kabupaten Bengkalis

3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



RAFIARDHI IKHSAN, S.STP, M.Si.
PEMERINTAH K. I
NIP. 19760312 199612 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala DPMPSTP Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;
- ④ 4. Yang Bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor
Lampiran
Hal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BENGKALIS**

Jl. Syahbandar II Desa Air
Putih Bengkalis 28712

Telp : (0766) 21600
Email : adpelbengkalis@gmail.com

Telex :
Fax : (0766) 21600

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Halaman 1 dari 1 milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Nomor : UM.002/1 / 20 /KSOP-BKS/2019
Klarifikasi : Biasa
Lamp : -
Perihal : Penelitian

Bengkalis, 19 November 2019

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Suska Riau

Di-

PEKANBARU

1. Menanggapi surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupateb Bengkalis No:061/DPMPSP-JU/XI/2019/611, Tanggal 18 November 2019 perihal Rekomendasi Mengadakan Riset Dalam Rangka Penulisan Skripsi.
2. Tersebut butir 1 (satu) diatas, kami menerima mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Atas Nama Ayu Rahmawaty, NIM 11527202967, Program Studi Ilmu Hukum telah selesai melakukan penelitian dan memperoleh data yang digunakan untuk penyelesaian skripsi (mini thesis) tersebut mulai tanggal 18 November 2019 s/d 25 November 2019 di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis.
3. Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN



Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19630526 198902 1 001

Tembusan:

1. Ybs. Saudari Ayu Rahmawaty.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "PENGAWASAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERHADAP PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DI KABUPATEN BENGKALIS", ditulis oleh saudara :

Nama : AYU RAHMAWATY

NIM : 11527202967

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 3 Oktober 2019

Narasumber : MUSRIFAH, SH., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, 7 Oktober 2019

Narasumber

Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

Musrifah, SH., MH
NIP. 130 217 039

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan naskah, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masa
3. Pengutipan tidak memperbolehkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

NAMA

NOMOR MAHASISWA

JUDUL USUL PENELITIAN

: Ayu Rahmawaty

: 11527202967

: Pengawasan kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan terhadap pelabuhan ilegal berdasarkan peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor 76 tahun 2018 (studi kasus kabupaten bengkalis)

: Kamis / 03 Oktober 2019

:

: ~~Disetujui / Ditolak~~ / Disempurnakan

: ~~Jelas / Masih Kabur~~ / Perlu Perbaikan

: ~~Jelas / Masih Kabur~~ / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas

: ~~Jelas / Mengambang~~ / Perlu Perbaikan

: ~~Jelas / Kurang Jelas~~ / Perlu Disempurnakan

: ~~Cukup Tajam~~ / Perlu Dipertajam

: ~~Jelas / Masih Kabur~~ / Perlu Perbaikan

: ~~Cukup~~ / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti

Hasil Tgl. Diseminarkan

Hasil Seminar dirumuskan adalah

a. Judul

b. Latar Belakang Masalah

c. Permasalahan

d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

e. Kerangka Teoritis (jika ada)

f. Rumusan Hipotesis (jika ada)

g. Metode Penelitian

h. Daftar Pustaka

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Musrifah, SH, MH

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar

Dikonsultasikan dengan WD I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

States Islamic University of Sultan Syarif Kasim



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9131/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : AYU RAHMAWATY
NIM : 11527202967
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 30 OKTOBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 12 November 2019



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PENGAWASAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERHADAP PELABUHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DI KOTA BENGKALIS”, yang ditulis oleh:

Nama : AYU RAHMAWATY
NIM : 11527202967
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Maret 2020
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji I
Ilham Akbar, SHL., SH., MH

Penguji II
Dr. H. Abu Samah, MH

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

JALINUS, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **AYU RAHMAWATY**

NIM : **11527202967**

Program Studi : **STUDI ILMU HUKUM**

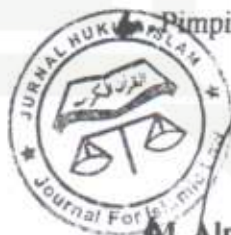
Judul : ***Pengawasan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Di Kota Bengkalis***

Pembimbing : **Syafrinaldi, SH.MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 April 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPI.

NIK. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Ayu Rahmawaty, dilahirkan di Bengkalis pada 17 April 1997. Anak ke empat dari lima bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Amran Gidam dan Ernawati, saat ini penulis tinggal di jalan Bangau Sakti, Pekanbaru. Penulis menempuh pendidikan mulai dari TK Tunas Harapan tamat

pada tahun 2003, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDS YKPP Sungai Pakning tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPS YKPP Sungai Pakning tamat pada tahun 2012 dan setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bukit Batu yang tamat pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2017 Penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri Bengkalis, setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Pada tanggal 10 Maret 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Pelabuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Kota Bengkalis”.